

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Cendana Press, 1984).
- Alvon Kurnia Palma, Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi, (Jakarta : YLBHI, 2013)
- AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Darman Primts, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, (Penerbit Djambatan, 2002).
- Febri Handayani, Bantuan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).
- H. Patrick Glenn, Menciptakan Peluang Keadilan, (Jakarta: The W dalam segala aspek World Bank, 2005).
- Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011).
- Heri Tahir, Proses Hukum yang Adil Dalam Peradilan Pidana di Indonesia, (Jogyakarta: Laksbang, Pressindo, 2010).
- Hutabarat, Ramly, Persamaan dihadapan hukum (equality before the law), (Jakarta : Ghalia, 1985).
- Ignatius Ridwan Widyadarma, Etika Profesi Hukum dan Keperanannya, (Semarang: UNDIP, 2001).
- Imam Mahdi, dkk. Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin, (Bengkulu : Cv.Zigie Utama, 2019).
- Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Ivon Kurnia Palma, Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi, (Jakarta: YLBHI, 2013).
- Lasdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1989)
- Muhamad Sanusi, Kode Etik Penasehat-Penasehat: Pengertian, Penjabaran, dan Penerapannya, (Jakarta: Kompilasi Khusus Advokat AAI, 1997).

- Muladi, Politik, Hukum, dan Politik Hukum, Dalam: Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: The Habibie Center, 2002)
- Rawls, John. A Theory Of Justice (Teori Keadilan), Cetakan Ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Sartono, Suryani, B. Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat, (Jakarta Timur : Dunia Cerdas, 2010).
- Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, (Jogyakarta: Genta Press, 2008)
- _____, Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis), (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Sunarno Edy Wibowo, Etika Profesi : Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, (Surabaya : Narotama University Press, 2016)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Pada Peradilan Umum.
- Suwardi Endraswara, Filsafat Ilmu, (Yogyakarta: Caps, 2012).
- Todung Mulya Lubis, Bantuan Hukum Struktural; Redistribusi Kekuasaan dan Partisipasi dari Bawah, (Jakarta: Prisma No.5, 1981)
- W. friedmann, Legal Theory, (London : Steven & Son Limited, 1960)
- Winata, Frans Hendra, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Yusriyadi, Bantuan Hukum, Kajian Empirik Implementasi Ide-Ide Hukum, (Semarang: Undip Press, 2017)

B. Makalah, Jurnal, dan Artikel, dan Lain-lain

- Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1982.
- Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Juni 2014.

Asshiddiqie, Jimly. Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum. Orasi Hukum DPP, 2008.

Barda Nawawi Arief, Kumpulan Seminar Nasional ke I s/d VII dan Konvensi Hukum Nasional, (Semarang: Pustaka Magister UNDIP, 2008).

Cappellitti Dan Gorley Dalam Jurnal Ni Komang Sutrisni, Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. Jurnal Advokasi Vol 5 No. 2 September 2015.

Edi Gunawan, Eksistensi Dan Peran Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum di Hukum di Pengadilan Agama, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2012

Esmi Warasih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2002.

Indarti, E. Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

Loebby Loqman, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi UNDIP, (Semarang, 1995).

C. Peraturan

Kode Etik Advokat Tahun 2002

Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2003 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang – Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan

International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).